

BUDAYA POLITIK KYAI DI PEDESAAN
(Studi Kasus Kyai Pesantren di Kabupaten Pekalongan)¹

Abstrak:

Kyai pesantren di pedesaan memiliki tipologi yang bervariasi. Berdasarkan perannya, kyai pesantren di Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan ke dalam : kyai kitab, kyai spiritual (tarekat), kyai hikmah, kyai politik dan kyai advokatif. Bentuk dan orientasi aktivitas politik kyai dapat dibedakan menjadi tiga kategori, (1) budaya politik kyai pesantren parokial (apathies), menutup diri terhadap aktivitas politik dan sistem politik yang berlaku di masyarakat; (2) budaya politik kyai pesantren subyek (partisipan pasif), tidak menutup diri terhadap aktivitas politik, tetapi tidak berpartisipasi aktif; dan (3) budaya politik kyai pesantren partisipan, kyai pesantren berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Studi ini menunjukkan bahwa budaya politik kyai pesantren beragam dan berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi yang ada disekitar lingkungannya.

Kata kunci : *kyai pesantren, jaringan sosial, budaya politik*

Pendahuluan

Posisi sentral kyai dalam konteks sosial keagamaan dan politik, secara historis sudah berlangsung sejak zaman sebelum kemerdekaan. Peran penting kyai dalam masyarakat di pedesaan juga diakui Kurasawa (1993) yang melihat kyai sebagai pemimpin spiritual dan memperoleh kehormatan dari rakyat. Lebih lanjut Kurasawa menyatakan bahwa ketika zaman penjajahan Belanda banyak kyai yang berperan sebagai pemimpin gerakan anti penjajahan, sehingga ditakuti Belanda. Demikian juga Dirjosanyoto (1999) yang melihat bahwa kyai berada pada posisi mendua; di satu sisi ia adalah tokoh agama, di sisi lain ia tokoh politik. Peran ganda ini memberinya ruang gerak yang cukup untuk melakukan berbagai variasi aktivitas baik dalam aspek keagamaan maupun politik.

Dilihat dari realitas politik, masyarakat Pekalongan mempunyai karakteristik yang sangat menghormati kyai. Kondisi ini tidak lepas dari penghargaan warga masyarakat Pekalongan terhadap peran kyai yang tidak terbatas pada permasalahan agama saja, akan tetapi secara luas berpengaruh dalam kehidupan baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Kyai memiliki pengaruh dan kharisma yang kuat yang menempatkan mereka menjadi kekuatan politik tersendiri dalam masyarakat (Wargatjie, 1996). Kekuatan ini yang membuat kyai dan

pesantrennya seringkali menjadi sasaran tarik menarik antar kekuatan sosial politik di Indonesia.

Fenomena ini mencerminkan bahwa *budaya politik*² kyai berpengaruh luas dalam struktur kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pekalongan. Kepemimpinan kyai yang kharismatik merupakan sosok penting yang berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Dengan figur kharismatik ini kyai ikut berpengaruh dalam membentuk kehidupan sosial, kultural dan keagamaan warga masyarakat.

Makalah ini mencoba menjawab satu pertanyaan sentral, yaitu bagaimana bentuk budaya politik Kyai pesantren di pedesaan? Dalam makalah ini, penulis juga mencoba mengulas beberapa persoalan seperti : (1) Mengapa kyai pesantren masih mempertahankan tradisi pesantren yang paternalistik, bagaimana dampaknya terhadap tradisi pengajaran di pesantren? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan kyai pesantren dalam mempertahankan otoritasnya melalui pembentukan jaringan di pedesaan? (3) Bagaimana bentuk orientasi, pandangan dan perannya dalam arena politik sesuai dengan karakteristik masing-masing kyai pesantren?

Menjawab sejumlah persoalan tersebut di atas, penting bila kita ingin mengetahui (1) langkah-langkah yang dilakukan Kyai pesantren dalam mempertahankan tradisi pesantren yang paternalistik dan dampaknya terhadap tradisi pengajaran di Pesantren; (2) langkah-langkah yang dilakukan kyai pesantren dalam mempertahankan otoritas dan kewibawaannya melalui pembentukan jaringan di pedesaan; dan (3) orientasi, pandangan dan perannya dalam arena politik sesuai dengan karakteristik masing-masing kyai pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali data yang bersifat subyektif dan historis. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini menggunakan strategi *studi kasus*, yaitu suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau menginterpretasikan suatu kasus (*case*) dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Baedhowi, 2001).

Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan '*how*' atau '*why*' (Yin, 2002). Kasus yang dianggap khusus dalam konteks ini adalah tradisi dan dinamika pesantren, jaringan sosial kyai di pedesaan, kyai pesantren dan arena politik di pedesaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi data (kombinasi berbagai sumber data). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan berpartisipasi, penelusuran

dokumen dan riwayat hidup individu yang diteliti (Denzin,1989). Riwayat hidup yang akan digali adalah riwayat hidup tineliti yang mencakup pengalaman masa lalu tineliti terutama yang berkaitan dengan tradisi pesantren. Pengumpulan data primer dari informan kunci dilakukan dengan pendekatan *Snowball*, yaitu suatu proses menyebarnya informan yang seibarat bola salju, yang pada mulanya kecil kemudian semakin membesar (*Sanapiah, 1990*).

A. Tradisi dan Dinamika Pesantren

A.1. Sistem Interaksi di Pesantren

Sistem interaksi di kalangan santri berjalan melalui kontak langsung dan dilandasi prinsip persaudaraan yang terjalin kuat antara santri yang satu dengan santri lainnya. Pola hubungan di kalangan santri yang mengarah kepada persahabatan sejati ini didasarkan atas hubungan simpatik yang berarti suatu keinginan untuk mengidentifikasi kepentingan. Semakin individualis seseorang, semakin sukar baginya untuk berusaha mengidentifikasi dirinya dengan orang lain (Mannheim, 1987).

Langkah yang ditempuh untuk membentuk dan mempertahankan kebersamaan dalam komunitas pesantren antara lain melalui pembentukan tata tertib sebagai norma yang mengikat dan mengatur tata kehidupan santri di pesantren. Pemberian sanksi bagi pelanggarnya bentuknya beragam, dari hukuman membersihkan lingkungan pondok dan membayar denda bagi yang membolos dari kegiatan pesantren,³ digundul kepalanya⁴ ataupun dipulangkan dari pesantren.⁵ Pemberian sanksi tersebut pada dasarnya untuk mengarahkan agar santri mampu bertingkah laku sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan. Keceragaman cara berpakaian, tingkah laku terhadap kyai ataupun santri lainnya memperlihatkan adanya norma-norma yang mengaturnya. Dalam konteks ini, untuk menguji apakah keseragaman tingkah laku memang benar menggambarkan kesetiaan pada norma sosial, menurut David Berry (2003) adalah dengan melihat apakah tingkah laku yang menyimpang dari keseragaman tersebut mendapat sanksi.

A.2. Tradisi Hubungan di Kalangan Kyai dan Santri

Tradisi hubungan kyai-santri di daerah Pekalongan ada dua tipe: *Pertama*, pola *hubungan guru-murid* adalah hubungan yang terjalin antara kyai dan santri sebagaimana layaknya antara guru dengan murid dalam pola hubungan formal. Pola ini berlaku di lingkungan pesantren

Muhammadiyah; *kedua, pola hubungan bapak-anak*, yaitu pola hubungan yang terjalin antara kyai dengan santrinya sebagaimana layaknya antara bapak dengan anak. Dalam pandangan kyai, santri di samping sebagai anak didiknya juga dianggap sebagai bagian dari keluarganya. Tindakan ini mendorong terbentuknya pola hubungan yang terjalin antara kyai dengan santri sebagaimana layaknya hubungan antara bapak dan anak (*pola paternalisme*)⁶. Pola ini berlangsung di lingkungan pesantren *Nahdhatul Ulama* (NU) dan Rifa'iyah.

Pola hubungan paternalisme yang terjalin antara kyai dengan santri di pesantren dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri kyai yang bersangkutan yang memandang santri sebagai amanat yang harus dididiknya sebagaimana anaknya sendiri. Sedangkan Faktor ekstern berasal dari tradisi orang tua santri yang menyerahkan anaknya kepada kyai secara langsung dan santri yang menganggap kyai sebagaimana orangtuanya sendiri di pesantren. Di samping itu juga dipengaruhi oleh adanya doktrin dari *Ta'lim Muta'alim* yang mengajarkan ketaatan santri kepada kyainya.⁷ Ketaatan kepada kyainya merupakan salah satu cara santri untuk menghormati kyainya. Dalam tradisi pesantren, cara ini berjalan terus dan berkembang menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh santri. Kebiasaan tersebut menjadi tradisi yang terus dilakukan santri sehingga berkembang menjadi pedoman dan pengatur perilaku santri sebagai suatu tata kelakuan (*mores*) yang berlaku di pesantren.

A.3. Struktur Kekuasaan dan Pola Kepemimpinan di Pesantren

Berdasarkan struktur kekuasaan dan pola kepemimpinan pada pesantren di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Struktur Kekuasaan dan Pola Kepemimpinan Pesantren di Kabupaten Pekalongan

KOMUNITAS KYAI PESANTREN	STRUKTUR ORGANISASI	POLA KEPEMIMPINAN	POLA PERGANTIAN PEMIMPIN
Pesantren Muhammadiyah	Otoritas organisasai	Otoritas legal rasional	<i>Assigned status</i>
Pesantren Rifa'iyah	Otoritas semi organisasi	Paternalistik	<i>Ascribed status</i>
Pesantren Nahdhatul Ulama	Otoritas personal	Paternalistik	<i>Ascribed status</i>

Sumber: data lapangan

Di kalangan Muhammadiyah (Kasus pesantren Miftakhul Ulum), penunjukkan pemimpin pesantren berdasarkan pengangkatan oleh

pengurus, sehingga keputusan di pesantren berdasarkan *hirarki otoritas legal rasional*, yaitu kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi (Peter M. Blau, 1987). Demikian juga dalam sistem pergantian pengasuh (pemimpin) berdasarkan penunjukkan (*assigned status*).⁸

Pesantren dalam komunitas Rifa'iyah⁹ (Kasus Pesantren Al Insap dan As Sami'ani), pola kepemimpinan yang diterapkan adalah pola paternalistik. Status kyai sebagai pendiri ataupun penerus kyai sebelumnya menempatkan kyai sebagai pemegang otoritas mutlak atas pesantrennya, kecuali dalam penentuan kurikulum pesantren. Adanya keterikatan kyai pesantren untuk mengajarkan kitab-kitab karangan K.H. Ahmad Rifa'i menyebabkan otoritasnya lebih bersifat semi organisasi dalam arti otoritas kyai dalam pengelolaan pesantren memiliki keterikatan yang kuat dengan organisasi Rifa'iyah. Proses pergantian kepemimpinan pengasuh (pemilik) pesantren dilaksanakan melalui system warisan (*ascribed status*) berdasarkan hubungan kekeluargaan.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kalangan pesantren NU (kasus Pesantren Salafiyah Safiyah 01, Tarbiatul Muftadi'in dan Syarif Hidayatullah) yang menerapkan pola kepemimpinan paternalistik. Kyai mempunyai wewenang yang penuh atas pesantrennya termasuk dalam penentuan kurikulum pesantren. Pola kepemimpinan dalam pesantren berlaku seumur hidup. Proses pergantiannya berdasarkan system warisan (*ascribed status*) dengan mengacu pada hubungan keluarga (*genealogy*).

A.4. Dinamika Tradisi Pengajaran di Pesantren

Berdasarkan metode pengajarannya pesantren di daerah Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan menjadi 2 tipe : pesantren *salafiyah* dan pesantren kombinasi *salafiyah-khalafiyah*. Pesantren *salafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, sebagaimana berlangsung sejak pertumbuhannya. Metode pengajaran sistem *salaf* dilakukan melalui dua cara: *Pertama*, sistem *weton*¹⁰ atau *bandungan*, semacam ceramah umum. *Kedua*, sistem *sorogan*,¹¹ yaitu model belajar yang dilakukan oleh seorang kyai kepada santrinya dengan cara satu persatu santrinya *menyorogkan* (menyodorkan) kitabnya kepada kyainya, kemudian kyai membimbing santri yang sedang mempelajari kitab tersebut sampai khatam dan menguasainya. Sistem ini berlaku di Pesantren Al Insap, Syarif Hidayatullah, Tarbiyatul Muftadi'in dan As Sami'ani.

Pesantren kombinasi *salafiyah-kehalafiyah* adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajarannya dengan mengkombinasikan antara pendekatan tradisional dengan sistem *kehalaf*, yaitu kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan formal dan dilakukan secara berjenjang serta berkesinambungan dengan satuan program didasarkan pada satuan waktu tertentu seperti triwulan ataupun semesteran. Seperti di Pesantren Salafiyah Sadi'iyah 01 dan Pesantren Miftakhul Ulum.

Mengacu pada kedua sistem pengajaran di atas, dapat dilihat bahwa pesantren di satu sisi telah mengalami perubahan, namun di sisi lain masih tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada, sistem *salafiyah*. Sistem pengajaran *salafiyah* merupakan salah satu tradisi yang paling sering dipertahankan kyai. Pemeliharaan tradisi pesantren yang dilakukan oleh seorang kyai lebih bersifat sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya melalui usaha mempertahankan tradisi sebelumnya. Di sisi lain, fenomena ini menunjukkan bahwa pesantren *salaf* masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya.

B. Jaringan Sosial Kyai Di Pedesaan

Interaksi yang dilakukan kyai dengan berbagai pihak akan membentuk suatu jaringan sosial. Dalam perspektif sosiologi, suatu jaringan lazim dikonsepsikan sebagai suatu tipe hubungan antar aktor dengan ditandai hubungan timbal balik yang simetris (Usman,1991). Dalam konteks ini diasumsikan bahwa setiap hubungan antar aktor yang terjalin dalam masyarakat merupakan suatu bentuk jaringan (*the bulding block of network*). Karena itu, dasar hubungan sosial yang berbeda akan melahirkan jaringan yang berbeda pula. Berdasarkan hubungan sosial yang mendasarinya tipologi jaringan kyai pesantren di Kabupaten Pekalongan dibedakan dalam beberapa bentuk sebagai berikut :

(1) ***Jaringan Ideologi***; jaringan yang dibentuk karena adanya persamaan kepentingan ideologis, baik yang bersifat pemahaman keagamaan ataupun ideologi organisasi. Dalam konteks ini, antara kyai pesantren komunitas NU, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah memiliki jaringan hubungan karena adanya ikatan sebagai pemeluk agama yang sama. Sedangkan kalangan kyai NU dan Rifa'iyah memiliki ikatan yang sama sebagai penganut paham *Ahlusunah wal jama'ah* yang menjadi dasar organisasinya.¹² Dengan demikian, suatu jaringan mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika jaringan tersebut (Turner, 1998). Dalam konteks ini, aktor (kyai pesantren) yang terlibat dalam jaringan tersebut akan bertindak sesuai dengan jaringan yang ada.

(2) *Jaringan Genealogi*, jaringan yang terbentuk melalui hubungan darah ataupun kekerabatan antara kyai yang satu dengan kyai lainnya. Tradisi yang berlaku di kalangan kyai adalah memperkuat tali silaturahmi melalui pemeliharaan dan penciptaan ikatan kekerabatan.

(3) *Jaringan Intelektual*; jaringan yang terbentuk melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh kyai sebagai guru dan santri sebagai murid. Jaringan ini terbentuk melalui tradisi pesantren yang memelihara rantai transmisi intelektual yang biasa disebut dengan *sanad*.¹³Jaringan ini menunjukkan adanya pengakuan yang kuat dari santri kepada kyainya selaku guru yang telah mengajarnya dan memperoleh ilmu dari guru sebelumnya. Demikian seterusnya, sehingga antara pesantren yang satu dengan lainnya terbentuk jaringan penerus penyebaran ilmu agama dari guru yang sama.

(4) *Jaringan Kelembagaan*, jaringan yang terbentuk di kalangan kyai melalui institusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewadahi pertemuan para kyai dari berbagai organisasi sosial keagamaan (NU, Muhammadiyah dan Rifa'iyah). Melalui MUI, kyai pesantren membentuk jaringan kelembagaan yang menjadi media komunikasi antara kyai yang satu dengan lainnya di luar komunitasnya masing-masing

(5) *Jaringan Tarekat*, jaringan yang terbentuk karena adanya aktivitas spiritual keagamaan dalam rangka mendekati diri kepada Tuhan (tarekat)¹⁴. Tarekat juga mengembangkan konsep silsilah, yaitu rantai yang mengukuhkan otoritas guru. Melalui istilah itu, jalur transmisi otoritas dan *barokah* dibangun. Dengan cara ini, kekuatan spiritual guru dapat ditransmisikan ke generasi berikutnya (Tafsir, 1991). Kyai pesantren yang menjadi *mursyid* tarekat di lingkungannya masing-masing memiliki jaringan dengan kyai lainnya di berbagai pesantren yang menganut tarekat yang sama. Salah satu tokoh tarekat *Qodiriyah wa Naqsabandiyah* di Kabupaten Pekalongan adalah K.H.R.M. Syarifuddin yang menjadi *mursyid* tarekat setelah mendapat ijazah dari bapaknya yang menjadi guru tarekatnya yaitu Syekh Zaenal Abidin yang mendapat ijazah dari Syekh Thalhah salah satu murid Syekh Ahmad Khatib Sambah pendiri tarekat *Qodiriyah wa Naqsabandiyah*.

C. Kyai Pesantren dan Arena Politik di Pedesaan

C.1. Tipologi dan Orientasi Aktivitas Kyai Pesantren di Pedesaan

(1). *Kyai Pesantren Tipe Kyai kitab*, yaitu kyai pesantren yang berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). Tipe kyai kitab pada dasarnya merupakan peran yang melekat pada setiap kyai pesantren—sebab

selain sebagai pengasuh, kyai pesantren juga merupakan guru yang mengajarkan kitab-kitab ilmu agama baik di dalam pesantren maupun di masyarakat.

(2). **Kyai Pesantren Tipe Kyai spiritual (tarekat)**; kyai pesantren yang berperan sebagai mursyid (guru) dalam suatu jama'ah tarekat. Perannya dalam hal ini sebagai pembimbing jama'ahnya dalam memahami tarekat yang diikutinya agar terfokus kepada aktivitas mensucikan hati untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

(3). **Kyai Pesantren Tipe Kyai Hikmah**, kyai pesantren yang memiliki kemampuan supranatural dan memberikan pelayanan pertolongan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengobatan alternatif, pemberian amalan zikir dan *wiridan*, serta do'a untuk keberkahan (Tumanggor, 2004). Orientasi aktivitas kyai hikmah ini lebih mengarah kepada pelayanan sosial melalui pendekatan keagamaan untuk melakukan pengobatan tradisional atas dasar agama.

(4). **Kyai Pesantren Tipe Kyai Advokatif**, kyai pesantren yang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mampu berperan secara langsung melakukan kontrol sosial kepada masyarakat sekitarnya.¹⁵

(5). **Kyai Pesantren Tipe Kyai Politik**, kyai pesantren yang menjadi pengurus partai politik. Dalam pandangan tipe kyai politik, aktivitas politik hanya sebagai kendaraan untuk mengatur kehidupan di dunia, sedangkan urusan mengajar pesantren menyangkut kepentingan kehidupan dunia dan akhirat yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya.

C. 2. Partisipasi Kyai Pesantren dalam Arena Politik di Pedesaan

C.2.1. Partisipasi Kyai Pesantren dalam Afiliasi Politik di Pedesaan

Keterlibatan kyai dalam bidang politik tentunya tidak lepas dari paradigma relasi agama dan negara yang berhubungan secara *simbiotik*, di mana keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan (Zaenal, 2003). Dalam konteks ini agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun kehidupan bernegara. Pemikiran demikian mendorong kyai untuk terlibat dalam partisipasi politik.¹⁶

Partisipasi politik kyai yang mengarah kepada suatu afiliasi politik tertentu dalam prakteknya lebih disebabkan karena adanya ikatan solidaritas sebagai sesama anggota organisasi sosial keagamaan yang sama. Gejala seperti ini dapat dilihat pada waktu pelaksanaan pemilihan calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Calon DPD yang banyak

mendapat dukungan dari pemilih di daerah Pekalongan ada dua calon, yaitu Dra. Hj. Nafisah Sahal dari NU dengan perolehan suara sebanyak 98.160 suara dan Drs. Dahlan Rais, M.Hum. dari Muhammadiyah yang memperoleh dukungan suara sebanyak 27.811.

C.2.2. Partisipasi Kyai Pesantren dalam Agenda Rekrutmen Elit Desa

Bentuk dukungan kyai kepada calon tertentu adalah ketika kyai mengajak jama'ahnya untuk melakukan do'a bersama. Pola hubungan balas budi dan adanya harapan tertentu dari calon yang didukungnya merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi keterlibatan kyai dalam proses rekrutmen elit desa. Dalam konteks ini, posisi kyai cukup kuat karena kyai dapat memobilisasi massa jama'ahnya melalui kegiatan do'a bersama. Aktivitas ini dapat mempengaruhi massa pemilih karena melalui jaringan santri dan jama'ahnya kyai dapat memobilisasi massa untuk mendukung calon yang didukung oleh kyainya.

Selain pertimbangan kehidupan agamanya, dukungan seorang kyai kepada calon elit desa lebih dikarenakan adanya ikatan ideologi organisasi yang sama antara kyai dengan calon tersebut. Kyai NU akan lebih mendukung calon dari NU; kalangan Muhammadiyah juga akan mendukung calon dari komunitas Muhammadiyah.

C.2.3. Partisipasi Kyai Pesantren dalam Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dibedakan dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan (Mubyarto,1984). Di dalam tahap perencanaan, tidak semua warga desa ikut merencanakan, tetapi biasanya terwakili oleh mereka yang duduk dalam pemerintahan desa atau diwakili oleh pemuka desa.

Partisipasi kyai pesantren dalam pembangunan desa di wilayah Kabupaten Pekalongan tidak terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan kyai dalam proses pembangunan desa hanya sebatas memberi saran, dalam arti, ketika ada musyawarah di desa kyai diundang sebagai tokoh masyarakat dan diajak ikut rembukan dan hanya sebatas dimintai pandangan saja. Mengacu pada hal tersebut, kita dapat melihat bahwa kyai pesantren tidak terlibat secara langsung dalam perencanaan pembangunan desa karena sudah ada institusi yang mewakilinya seperti BPD untuk tingkat desa ataupun DPRD untuk tingkat kabupaten.

C.3. Tipologi Budaya Politik Kyai Pesantren di Pedesaan

Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan, simbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi di mana suatu peristiwa politik terjadi (Chilcote, 2003).¹⁷ Mengacu pada pemikiran di atas, budaya politik kyai pesantren di Kabupaten Pekalongan berdasarkan bentuk dan orientasi aktivitas politiknya dapat dibedakan menjadi tiga kategori. *Pertama*, budaya politik kyai pesantren parokial (*apathy*), yaitu tipe kyai pesantren yang menutup diri terhadap aktivitas politik dan menjauhkan diri serta tidak mau memasuki sistem politik yang berlaku di masyarakat. *Kedua*, budaya politik kyai pesantren subyek (partisipan pasif), yaitu kyai pesantren yang tidak menutup diri terhadap aktivitas politik, akan tetapi tidak berpartisipasi secara aktif. *Ketiga*, budaya politik kyai pesantren partisipan, yaitu kyai pesantren yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Karakteristik budaya politik di kalangan kyai pesantren baik di komunitas NU, Muhammadiyah dan Rifa'iyah di daerah Kabupaten Pekalongan memiliki keragaman yang berbeda (*lihat lampiran 1, 2, 3*)

Kesimpulan

Tradisi kepemimpinan kyai pesantren yang paternalistik di pesantren tetap bertahan karena disebabkan oleh faktor-faktor :

- (1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari diri kyai yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kyai memandang santri merupakan amanat yang diberikan kepada kyai sebagai anak didiknya sehingga harus diperlakukan dengan baik sebagaimana anaknya sendiri.
- (2) Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kyai pesantren, yang terdiri dari :
 - Tradisi perekrutan santri yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan.
 - Santri memandang kyai pesantren sebagaimana orang tuanya sendiri.
 - Doktrin Kitab *Taklim Muta'alim* yang mengajarkan tentang etika penghormatan santri kepada kyainya.

Dampak positif kepemimpinan paternalistik dalam kehidupan pesantren adalah adanya hubungan yang erat antara pemimpin (kyai) dengan yang dipimpin (santri), dimana kyai sebagai pemimpin di pesantren akan selalu memperhatikan pengikutnya sehingga ikatan sebagai keluarga besar pesantren tetap terpelihara. Sedangkan kelemahan dari pola kepemimpinan paternalistik adalah munculnya ketergantungan

yang kuat dari santri kepada kyainya, yang seringkali diwujudkan dalam bentuk pengkultusan kyai sebagai tokoh panutannya.

Jaringan sosial yang terbentuk antara kyai pesantren dengan masyarakat dan antara kyai yang satu dengan lainnya memperkokoh otoritas kyai pesantren di masyarakat. Jaringan sosial antara kyai dengan masyarakat terbina melalui berbagai ritual sosial keagamaan, seperti pengajian, do'a bersama, dan sedekah. Sedangkan jaringan sosial yang terbentuk antara kyai yang satu dengan lainnya di Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan ke dalam lima karakteristik, yaitu jaringan ideologis, jaringan genealogis, jaringan intelektual, jaringan kelembagaan dan jaringan tarekat.

Keterlibatan kyai pesantren dalam dunia politik dipengaruhi oleh paradigama relasi agama dan negara yang memandang bahwa antara negara dengan agama memiliki hubungan yang simbiotik, di mana keduanya terjalin hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam pandangan kyai pesantren aktivitas politik diperlukan untuk mendukung kegiatan keagamaan sebagai sarana perjuangan di dunia.

Partisipasi kyai dalam penentuan afiliasi politik tertentu dipengaruhi oleh adanya ikatan solidaritas sebagai sesama anggota organisasi sosial keagamaan yang sama. Sedangkan dukungan kyai pesantren terhadap calon elit desa di landasi oleh, *pertama*, ketaatan calon dalam kehidupan beragama; *kedua*, adanya ikatan solidaritas sesama anggota organisasi sosial keagamaan yang sama; dan *ketiga*, pola hubungan balas budi dan memiliki harapan terhadap calon yang bersangkutan.

Berdasarkan perannya di masyarakat, kyai pesantren di Kabupaten Pekalongan dapat dikategorikan ke dalam lima tipe, yaitu *pertama*, kyai kitab, yaitu kyai pesantren yang berperan sebagai pendidik yang mengajarkan ilmu agama melalui kajian terhadap kitab-kitab kuning (klasik). *Kedua*, kyai tarekat, yaitu kyai pesantren yang berperan sebagai *mursyid* (guru) dalam suatu jama'ah tarekat. *Ketiga*, kyai hikmah, yaitu kyai pesantren yang memiliki kemampuan supranatural dan memberikan pelayanan pertolongan kepada masyarakat untuk mendapatkan pengobatan alternatif, pemberian amalan zikir dan *wiridan*, serta do'a untuk keberkahan. *Keempat*, kyai Politik, yaitu kyai pesantren, di samping masih tetap mengajar santri dan jama'ahnya, juga menjadi pengurus partai politik. *Kelima*, kyai advokatif, yaitu kyai pesantren selain melakukan pengajaran kepada santri dan jama'ahnya juga memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat serta mampu berperan secara langsung melakukan kontrol sosial kepada masyarakat sekitarnya. Tipe kyai advokatif memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah

yang ada di lingkungannya. Hal ini menunjukkan bahwa kyai pesantren tipe advokatif memiliki peran yang mampu mengontrol secara langsung masyarakat sekitarnya.

Budaya politik kyai pesantren di Kabupaten Pekalongan berdasarkan bentuk dan orientasi aktivitas politiknya dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *Pertama*, tipe budaya politik kyai pesantren *parokial (apathies)*. *Kedua*, budaya politik kyai pesantren *subyek (partisipan pasif)*. *Ketiga*, budaya politik kyai pesantren *partisipan*, yaitu kyai pesantren yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan politik. Ketiga tipologi tersebut dipengaruhi oleh dinamika fokus kegiatan organisasi sosial keagamaan kyai yang bersangkutan serta tindakan adaptasi dengan iklim politik di masyarakat. Dengan kata lain tipologi budaya politik kyai tidak bersifat statis akan tetapi dinamis menyesuaikan dengan kondisi sosial politik yang ada di masyarakat.

Lampiran 1: Tipologi Budaya Politik Kyai Pesantren di Lingkungan Nahdhatul Ulama

MASA PERKEMBANGAN NAHDHATUL ULAMA	ORIENTASI AKTIVITAS KYAI PESANTREN	TIPOLOGI BUDAYA POLITIK KYAI PESANTREN
Masa Pergerakan Kemerdekaan (1926-1945)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang sosial keagamaan : dakwah, mengajar 	Subyek (<i>partisipan pasif</i>)
	<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam pembentukan peraturan perkawinan umat Islam dan perbaikan organisasi penghulu • Pengurus Masyumi • Anggota BPUPKI/PPKI 	Partisipan
Masa Awal Kemerdekaan (1945-1952)	Pengurus Masyumi	Partisipan
Masa NU sebagai partai politik (1952-1973)	Pengurus partai politik	Partisipan
Masa NU memfusikan diri dengan PPP (1973-1983)	Pengurus partai politik	Partisipan
Masa NU kembali ke khittah 26 tahun 1984 – 1997	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang sosial keagamaan : dakwah, mengajar 	Subyek (partisipan pasif)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus partai politik 	Partisipan
Masa Reformasi (1998-sekarang) menuju khittah plus	<ul style="list-style-type: none"> • Menghendaki khittah dan aktif dipartai politik (kyai pesantren tipe politik) 	Partisipan
	<ul style="list-style-type: none"> • Menghendaki khittah dan komitmen terhadap khittah serta tidak menjadi pengurus partai politik 	Subyek

Lampiran 2 : Tipologi Budaya Politik Kyai Pesantren di Lingkungan Muhammadiyah

MASA PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH	ORIENTASI AKTIVITAS KYAI PESANTREN	TIPOLOGI BUDAYA POLITIK KYAI PESANTREN
Masa Pergerakan Kemerdekaan (1912-1945)	aktivitas organisasi sosial keagamaan melalui bidang sosial, pendidikan, dakwah, keschatan dan pelayanan kemanusiaan	Subyek (partisipasi pasif)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Masyumi • Anggota BPUPKI/PPKI 	Partisipan
Masa Muhammadiyah bergabung dengan Masyumi (tahun 1945-1959)	Pengurus Masyumi	Partisipan
Masa modernisme politik (tahun 1960-1970)	Pengurus partai politik	Partisipan
	aktivitas organisasi sosial keagamaan melalui bidang sosial, pendidikan, dakwah, keschatan dan pelayanan kemanusiaan	Subyek (partisipasi pasif)
Masa gerakan non politik (tahun 1971-1997)	aktivitas organisasi sosial keagamaan melalui bidang sosial, pendidikan, dakwah, keschatan dan pelayanan kemanusiaan	Subyek (partisipasi pasif)
Masa Reformasi (1998-sekarang) menuju khittah plus	• Menghendaki ijthad politik dan terlibat dalam kegiatan politik	Partisipan
	• Menghendaki ijthad politik namun tidak menjadi pengurus partai politik	Subyek

Lampiran 3 :Tipologi Budaya Politik Kyai Pesantren di Lingkungan Rifa'iyah

MASA PERKEMBANGAN MUHAMMADIYAH	ORIENTASI AKTIVITAS KYAI PESANTREN	TIPOLOGI BUDAYA POLITIK KYAI PESANTREN
Masa pembentukan (tahun 1850 –1859)	Pembaharuan keagamaan dan revivalisme terhadap kolonial	Parokial
Masa kritis (tahun 1850-1949)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi intern melalui pengajian • Isolasi dengan pihak luar 	Parokial
Masa konsolidasi (tahun 1950-1965)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi intern • Bergabung dengan Masyumi dan organisasi lainnya • Pengembangan pesantren 	Subyek (partisipan pasif)
Masa pengembangan (tahun 1965 – sekarang)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan organisasi resmi • Fokus kegiatan pada pengembangan pendidikan baik formal (sekolahan) maupun non formal (pesantren) • Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis 	Subyek (partisipan pasif)

Catatan Akhir:

¹ Makalah merupakan bagian dari tesis penulis pada Program Magister Sains Sosiologi Pedesaan Sekolah Pascasarjana IPB

² Dalam konteks ini budaya politik kyai pesantren sebagai suatu orientasi atau pandangan individu kyai berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya terhadap suatu sistem politik. Pada intinya budaya politik mengacu pada orientasi politik, pandangan terhadap sistem politik serta peran individu dalam sistem. Dengan demikian budaya politik secara umum ia merujuk pada keyakinan, symbol dan nilai-nilai. Bagi individu budaya politik berfungsi memberikan pedoman yang mengatur tingkah laku politik, sedangkan bagi masyarakat budaya politik memberikan struktur nilai yang sistematis serta pertimbangan rasional agar tercipta koherensi antar institusi. Dengan demikian keberadaan kyai sebagai pemimpin non formal memiliki tempat tersendiri dalam struktur kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pekalongan. Lihat Chilcote, Ronald H., 2003, *Teori Perbandingan Politik : Penelusuran Paradigma*, terjemahan dari Buku *Theories of Comperatifve Politics The Search for a Freedom* oleh Haris Munandar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Pemberian sanksi bagi santri yang tidak sholat berjama'ah dan mengikuti pengajian tanpa alasan yang jelas, selain diberi sanksi untuk membersihkan lingkungan pondok, juga harus membayar denda Rp. 2.000,- untuk kas pondok. Tradisi ini berlaku di Pesantren Tarbiyatul Muftadi'in di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kab. Pekalongan

⁴ Pemberian sanksi bagi santri yang berkelahai ataupun mengambil barang milik santri lain tanpa ijin, tradisi ini berlaku di pesantren Muhammadiyah Miftakhul Ulum di desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

⁵ Dipulangkan (diusir) dari pesantren merupakan sanksi yang paling berat bagi santri, sanksi ini diberikan kepada santri yang seringkali melanggar tata tertib dan melakukan perbuatan kriminal seperti : mencuri, menganiaya santri lainnya.

⁶ Paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin seperti hubungan antara ayah dan anak. (lihat Soeparno, 1990, Kata Serapan Bahasa Barat 2001, Media Wiyata, Semarang)

⁷ Lihat Zarnuji, Syekh Al, 2001, *Etika Menuntut Ilmu* (terjemahan dari *Ta'limul Muta'allim* oleh Achmad Sunarto), Penerbit Husaini Bandung . dan Zarnuji, Syekh Al, 1995, *Terjemah Ta'lim Muta'alim* (terjemahan dari *Ta'lim Muta'alim Tariqatta'allum* oleh Abdul Kadir Aljufri) Penerbit Mutiara Ilmu Surabaya

⁸ *Ascribed status* adalah kedudukan yang diperoleh seseorang karena kelahiran (keturunan). Sedangkan *Assigned status* merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. *Assigned status* sering mempunyai hubungan yang erat dengan *achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja. Dalam konteks ini, *assigned status* yang diterima kyai karena yang bersangkutan dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin pesantren. Lihat Mayor Polak, 1966, *Sosiologi Pengantar Ringkas*, Penerbit Ihtiar Jakarta. Hlm. 198

⁹ Gerakan Rifa'iyah merupakan gerakan sosial keagamaan yang pada awalnya muncul di desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sekitar tahun 1850 yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Rifa'i. Jama'ah Rifa'iyah mulai tertata organisasinya setelah dibentuknya Yayasan Pendidikan Islam Rifa'iyah pada tanggal 7 Mei 1965 bertepatan dengan tanggal 7 Asyuro 1384 hijriyah. Sejak saat itu jama'ah Rifa'iyah mulai memusatkan pada kegiatan pendidikan. Wawancara dengan K.H. Ali Nahri (Pengurus Pusat Rifa'iyah) pada tanggal 9 Mei 2004. Lihat juga Darban, Ahmad Adaby, 2004, *Rifa'iyah : Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Penerbit Tarawang Press, Yogyakarta

¹⁰ Istilah *weton* dari kata *wektu* (bahasa Jawa) yang berarti waktu, karena pelajaran diberikan pada waktu-waktu tertentu (misalnya sehabis dhuhur/magrib). Sistem *weton* biasanya diterapkan untuk santri tingkat lanjut.

¹¹ istilah *sorogan* dari kata *sorog* (bahasa Jawa) sama dengan kata sorong yang berarti mendorong, maksudnya setiap santri harus mendorong kitabnya kepada kyai, kemudian kyai menjelaskan tema yang ditelaah dari kitab tersebut secara bergiliran satu persatu.

¹² Pada dasarnya Rifa'iyah menganut paham Ahlussunah waljama'ah, namun dalam prakteknya lebih mengacu pada kitab Tarjumah disusun oleh K.H. Ahmad Rifa'i. Prinsip *ahlussunah wal jama'ah* mengandung dua elemen penting, yaitu *ahlussunnah* dan *al jama'ah*. *Ahlussunah* menggambarkan bagaimana agama harus ditafsirkan dan dipraktekkan berdasarkan ajaran Rasulullah, sedangkan *al jama'ah* melambangkan persambungan tradisi keberagaman Rasulullah dengan periode berikutnya, yaitu kelompok yang mempertahankan tradisi keagamaan. Lihat Muzadi, Hasyim, 1999, *Nahdhatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, PT Logos Wacana Ilmu, Ciputat. Hlm. 114

¹³ *Sanad* merupakan rantai transmisi silsilah intelektual melalui peruntutan silsilah yang berkesinambungan dari guru-guru sebelumnya sampai pada tokoh tertentu biasa Nabi Muihammad SAW. Lihat Dhofier Z., 1994, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta. Hlm. 79

¹⁴ *Thareqah* sering diartikan sebagai jalan menuju Tuhan dibawah bimbingan seorang guru (lihat Ahmad Tafsir, 1991, Tarekat dan Hubungannya dengan Tasawuf, dalam buku Harun Nasution (ed.), 1991, *Thoriqot Qodiriyyah Naqsabandiyah : Sejarah, Asal usul dan Perkembangannya*, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya).

¹⁵ Kyai advokatif memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masalah yang ada di lingkungannya. Kasus Kyai Abdul Hamzah di daerah Kesesi menunjukkan perannya yang mampu mengontrol secara langsung masyarakat sekitarnya. Kontrol sosial dalam hal ini adalah menyangkut proses yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi norma dan nilai. Lihat .Soekanto, Suryono, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹⁶ Partisipasi politik merupakan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik dari ketidakterlibatan memberikan suara (abstain) sampai dengan menduduki berbagai jabatan dalam sistem politik. Lihat Rush Michael dan Philip Althoff, 2003, *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 122-126

¹⁷ Chilcote membedakan budaya politik kedalam tiga tipe, yaitu pertama, *tipe parokial* (apatis) mengisyaratkan bahwa individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah terhadap pemerintah dan umumnya tidak merasa terlibat bahkan seringkali bersifat apatis. Kedua, *tipe subyek*, dimana individu-individu peduli dengan keluaran-keluaran yang dicapai pemerintah namun tidak berpartisipasi dalam proses-proses yang menghasilkan keputusan-keputusan kebijakan tertentu, dengan kata lain subyek merupakan penonton. Ketiga, *partisipan*, dimana individu-individu bersikap aktif dan terlibat dengan sistem secara utuh, yaitu dalam proses-proses input maupun outputnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Ayumardi, 2004, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII : Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta
- Bapeda, 2003, *Kabupaten Pekalongan dalam Angka Tahun 2003*, diterbitkan kerjasama Bapeda Kabupaten Pekalongan dengan Biro Statistik Kabupaten Pekalongan
- Baedhowi, 2001, *Studi Kasus*, dalam Teori dan Paradigma Penelitian Sosial oleh : Salim Agus (ed.), PT Tiara Wacana, Yogyakarta
- Berry, David, 2003, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (terjemahan dari *The Principles of Sociology* : oleh Paulus Wirutomo), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chilcote, Ronald H., 2003, *Teori Perbandingan Politik : Penelusuran Paradigma*, terjemahan dari Buku *Theories of Comparative Politics The Search for a Freedom* oleh Haris Munandar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darban, Ahmad Adaby, 2004, *Rifa'iyah : Gerakan Sosial Keagamaan di Pedesaan Jawa Tengah Tahun 1850-1982*, Penerbit Tarawang Press, Yogyakarta
- Denzin, N.K. 1989. *Interpretive Biography : Qualitative Research Method Series 17*. Sage Publications.
- Departemen Agama, 2003, *Profil dan Data Perencanaan Departemen Agama Kabupaten Pekalongan tahun 2003 di wilayah Kabupaten Pekalongan*
- Dhofier Z., 1994, *Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, LP3ES, Jakarta
- Dirdjosanjoto, P., 1999, *Memelihara Umat : Kiai Pesantren-Kiai langgar di Jawa*, LKIS, Yogyakarta

-
- Hafifuddin, 2004, *Konsep Ijtihad NU dalam Penerapan Hukum Islam : Suatu Analisis Pemikiran Modern NU*, dalam SARWAH Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim Volume 01 N0. 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe Nangroe Aceh Darussalam
- Hudaeri, M. dkk, 2003, *Tasbih dan Golok : Studi Tentang Kharisma Kyai dan Jawara di Banten*, dalam ISTIQRO Jurnal Penelitian Islam Indonesia Volume 02 No. 01 Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Departemen Agama RI
- Irsyam, Mahrus, 1984, *Ulama dan Partai Politik*, Yayasan Perkhidmatan, Jakarta
- Johnson Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern (terjemahan dari Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspective ; oleh Robert M. Z. Lawang)*, PT Gramedia, Jakarta
- Kurasawa, 1993, *Mobilitas dan Kontrol Sosial : Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (terjemahan dari Mobilization and Control oleh Hermawan Sulistyono), PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mannheim, Karl, 1987, *Sosiologi Sistematis : Suatu Pengantar Studi Tentang Masyarakat* (terjemahan dari *Systematic Sociology* oleh Alimandan), Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Mayor Polak, 1966, *Sosiologi Pengantar Ringkas*, Penerbit Ihtiar Jakarta
- Miles Matthew B., A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (terjemahan dari *Qualitative Data Analysis* oleh Tjejep Rohandi Rosidi), UI Press, Jakarta
- Mubyarto, 1984, *Strategi Pembangunan Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Muzadi, Hasyim, 1999, *Nahdhatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, PT Logos Wacana Ilmu, Ciputat
- Neuman, W.L. 1994. *Sosial Resarch Method : Qualitative and Quantitative Approach*. (2 nd Edition). Allyn and Bacon Sydney.
- Peter M. Blau. , Marshall W. Meyer, 1987, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, UI Press, Jakarta.
- Rush Michael dan Philip Althoff, 2003, *Sosiologi Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sanapiah, Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Y A 3 Malang, Malang
- Sitorus, MT. Felix, 1998, *Penelitian Kualitatif : Suatu Perkenalan*, DOKIS IPB
- Soemardjan Selo dan S. Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Suryono, 1993, *Kamus Sosiologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tafsir, Ahmad, 1991, *Tarekat dan Hubungannya dengan Tasawuf*, dalam *Thoriqot Qodiriyah Naqsabandiyah : Sejarah, Asal usul dan Perkembangannya* oleh Harun Nasution (ed.), Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Tasikmalaya
- Tumanggor, Rusmin, 2004, *Persentuhan Medis Modern dan Tradisional di Indonesia*, makalah pidato pengukuhan Prof. Dr. Rusmin Tumanggor, MA sebagai Guru Besar bidang Antropologi Kesehatan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 20 Maret 2004

-
- Turner, J. H. dan Maryanski, Alexandra, 1998, *Network Analysis*, dalam Jonathan H. Turner (ed.), *The Structure of Sociological Theory*, Wadsworth Publishing Company ITP An international Thomson Publishing Company
- Usman Sunyoto, 1991, Struktur Interaksi Kelompok elit dalam Pembangunan : Penelitian di Tiga Desa Santri, *Jurnal Prisma* No. 6 Juni 1991, LP3ES, Jakarta
- Wargatjie, S.N., dkk, 1996, *Pesantren : Dari Pendidikan hingga Politik*, Kompas 14 Oktober 1996, Jakarta
- Zarnuji, Syekh Al, 2001, *Etika Menuntut Ilmu* (terjemahan dari *Ta'limul Muta'allim* oleh Achmad Sunarto), Penerbit Husaini Bandung
- Zarnuji, Syekh Al, 1995, *Terjemah Ta'lim Muta'alim* (terjemahan dari *Ta'lim Muta'alim Tariqatta'allum* oleh Abdul Kadir Aljufri) Penerbit Mutiara Ilmu Surabaya
-

Amir Fadhilah, staf pengajar Sosiologi Pedesaan di Jurusan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta